

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Kabupaten Rembang

Halaman 5 dan 10

Demi WTP, Perbaiki Pencatatan Aset

REMBANG-Selain menginginkan raihan Adipura pada tahun anggaran 2018, Pemkab Rembang juga mentargetkan bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP merupakan salah satu indikator bahwa pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih.

Dari dulu aset hanya didata saja oleh bendahara. Sedangkan setelah dicek di lapangan terkadang di data ada, namun barangnya tidak ada dan begitupun sebaliknya

ABDUL HAFIDZ
Bupati Rembang

Selama ini, pengelolaan aset menjadi kendala utama bagi Pemkab Rembang dalam meraih predikat WTP. Sebab aset-aset milik Pemkab Rembang banyak yang tidak terurus dengan baik.

"Dari dulu

aset hanya didata saja oleh bendahara. Sedangkan setelah dicek di lapangan terkadang di data ada, namun barangnya tidak ada dan begitupun sebaliknya," ujar Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Di masa pemerintahan Hafidz dan Bayu, pendamp-

ingan BPKP sudah hampir selesai setelah setahun berjalan. Meski begitu masih ada yang belum terselesaikan.

"Seperti di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Ini bagaimana penilaian aset jalan, aset yang ada di pengairan dan SD," terangnya.

Hafidz mengakui, aset seko-

lah SD selama ini juga masih menjadi persoalan, kasus tanah sekolah milik desa, ada juga yang milik perseorangan namun gedungnya milik pemkab. "Sebanyak 80 persen keberadaan sekolah SD kondisinya seperti itu," terangnya.

Terkait hal itu, Bupati Hafidz

pun mengambil kebijakan bagi tanah sekolah milik desa atau pribadi yang memang dijual, maka akan dibeli pemkab. Seperti di SDN Tlogotunggal milik pribadi yang kemudian dijual, maka langsung dibeli oleh Pemkab.

Selain itu, aset berupa jalan juga dinilai oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal selama ini, Pemkab Rembang tidak pernah memperhatikan hal itu.

"Sampai penilaian jalan yang 680 kilo itu nilainya berapa, itukan harus muncul semua angka-angkanya. Kita tidak pernah memperhatikan itu, nah sekarang kita

dituntut untuk WTP harus ada angka-angkanya. Irigasi yang di PU ada berapa meter, harganya berapa kan antar daerah beda. Di Ngajaran Sale dengan kota beda, itukan tidak pernah terekam di dalam administrasi," ungkapnya.

Nilai atau harga yang berbeda di tiap daerah, imbu-

Hafidz, menjadi salah satu sulitnya pencatatan aset, sehingga diperlukan kecermatan. Saat ini per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk tim khusus untuk menangani aset, dengan adanya tim tersebut persoalan pencatatan aset diharapkan bisa teratasi. (sov/rif)